

Konflik Sosial dan Politik dalam Babad Demak: Refleksi terhadap Penguatan Integrasi Bangsa Indonesia

Achmad Fahkur Rozi¹

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya
 e-mail: achmadfahkurrozi666@gmail.com

Kavid Riyono²

Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan, Universitas Islam Majapahit
 e-mail: kavidriyono@gmail.com

Abstract

Babad Demak is a classical Javanese literature that contains the history of the establishment of the Demak Sultanate after the collapse of the Majapahit Kingdom, which was a period of religious and cultural transition on the island of Java from a culture dominated by Hindu-Buddhist elements to a culture with Islamic characteristics. In the effort to establish it, there was turmoil both from the internal political situation of the Majapahit Kingdom and from external factors due to the arrival of Islam on the island of Java. The purpose of this study is to find out: (1) The causes of socio-political conflict in the transition of Javanese Hindu-Buddhist culture to Islam in Babad Demak and (2) Reflections of an integrated society. The nature of this study is qualitative with a descriptive analytical method, while the techniques used to build this research were obtained through literature studies. The results of this study are in the form of obtaining information that at the end of the Majapahit Kingdom, the socio-political situation was in disarray because factors from within the palace could not manage the country properly. Based on the weaknesses at the end of the Majapahit Kingdom, a reflection can be taken that we can apply to create a good socio-political life for the future.

Keywords: History, Chronicle of Demak, Reflection.

Abstrak

Babad Demak merupakan sastra Jawa klasik yang memuat sejarah berdirinya Kesultanan Demak setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit yang merupakan masa peralihan keagamaan dan kebudayaan di Pulau Jawa dari budaya yang didominasi oleh unsur agama Hindu-Buddha menjadi budaya yang memiliki corak keislaman. Dalam usaha pendirian tersebut terjadi pergolakan baik yang berasal dari situasi politik internal Kerajaan Majapahit maupun yang berasal dari eksternal karena kedatangan Agama Islam di Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bentuk konflik sosial dan politik transisi kebudayaan Jawa Hindu-Buddha ke Islam dalam Babad Demak, dan (2) Refleksi masyarakat yang berintegrasi. Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitik,

sedangkan teknik yang digunakan untuk membangun penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini berupa perolehan informasi bahwa pada masa akhir kerajaan Majapahit situasi sosial dan politiknya berantakan karena faktor dari dalam pihak istana tidak dapat mengelola negara dengan baik. Berdasarkan kelemahan-kelemahan pada akhir Kerajaan Majapahit tersebut dapat diambil suatu refleksi yang dapat kita terapkan guna menciptakan kehidupan sosial dan politik yang baik untuk kedepannya.

Kata Kunci : Sejarah, Babad Demak, Refleksi.

PENDAHULUAN

Dewasa ini kondisi sosial politik di Indonesia mengalami ketidakstabilan, hal ini dapat dilihat dari adanya demonstrasi mahasiswa besar-besaran “Indonesia Gelap” pada bulan Februari 2025 akibat rencana pemotongan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah (Reuters, 2025). Demonstrasi ini apabila tidak ditanggapi oleh pemerintah, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan yang lebih serius dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pada hakikatnya kekacauan yang terjadi tersebut merupakan bagian dari siklus perubahan sosial. Coser (dalam Saifuddin, 1986:7) menjelaskan bahwa konflik merupakan sebuah hal yang normal dalam masyarakat karena akan membawa pada perubahan sosial dan budaya. Tetapi sebagai masyarakat apabila suatu kondisi masih bisa dipulihkan, maka upaya yang lebih baik adalah menyelamatkan keadaan melalui pelurusan kembali kebijakan yang akan atau sudah diterapkan supaya negara kembali kondusif dan rakyat dapat hidup dengan sejahtera.

Konflik yang terjadi di masyarakat sejatinya merupakan siklus. Di Indonesia sebelum era modern telah terdapat banyak kerajaan yang telah berdiri beserta dengan perjalanan masyarakatnya membentuk siklus perubahan sosial dan politik. Kuntowijoyo (2005) membagi pembabakan sejarah Indonesia menjadi zaman prasejarah, zaman kuno, zaman Islam, dan zaman modern. Dalam berbagai era tersebut terdapat berbagaimacam konflik dan perubahan sosial yang terjadi. Salah satu bentuk perubahan sosial dan politik penting yang terjadi dalam masyarakat Pulau Jawa adalah ketika terjadinya transisi antara kebudayaan kuno (Hindu-Buddha) ke kebudayaan Islam. Peristiwa ini berlangsung setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit dan berdirinya Kesultanan Demak.

Adanya konflik dan perubahan sosial dan politik pada masa transisi kebudayaan Jawa Hindu-Buddha ke Islam tercatat dalam naskah serat Babad Demak. Dalam naskah ini terekam bagaimana kondisi masyarakat Hindu-Buddha yang berangsur-angsur berpindah keyakinan dan bagaimana konflik sosial yang terjadi antara masyarakat Islam dengan masyarakat Hindu-Buddha. Penelitian ini akan membahas bagaimana konflik sosial dan

politik yang terjadi pada masa transisi kebudayaan Jawa Hindu-Buddha ke Islam dalam Babad Demak dan bagaimana korelasinya dengan konflik dan fenomena sosial dan politik yang terjadi pada zaman sekarang di Indonesia.

Penelitian mengenai Babad Demak sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Waridi Hendro Saputro dari Sastra Daerah, Universitas Sebelas Maret dengan judul Kearifan Lokal dalam Babad Demak, serta oleh Annisa Qurrotun Nada dari UIN Sunan Ampel dengan judul Konflik Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Demak pada abad 14-16 M menurut Babad Demak. Penelitian dari Waridi membahas soal kearifan lokal Jawa yang terkandung dalam Babad Demak hasil korelasi dan penafsiran terhadap kejadian dalam cerita, serta penelitian Annisa Qurrotun Nada membahas konflik Kerajaan Majapahit dengan Kesultanan dari aspek historis militer. Sedangkan pada penelitian ini hal yang akan dibahas adalah konflik secara sosial dan politik yang terjadi pada masa transisi kebudayaan Jawa Hindu-Buddha ke Islam dalam Babad Demak. Dalam pengkajian tersebut tentunya kondisi masyarakat menjadi fokus yang melatarbelakangi penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Filologi. Filologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki fokus kajian pada naskah-naskah kuno melalui beragam pendekatan seperti pendekatan historis, linguistik, dan sastra. Sebagai metode kajian terhadap teks-teks klasik, filologi bertujuan merekonstruksi teks yang mendekati bentuk aslinya serta memahami makna yang terkandung di dalamnya dalam konteks sosial, budaya, atau politik pada zamannya. Dalam buku Pengantar Teori Filologi, dijelaskan bahwa filologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai hal yang terdapat dalam naskah-naskah lama (Baried, 1985). Dalam penelitian ini, pendekatan filologi menjadi relevan karena Babad Demak termasuk dalam kategori babad, yaitu karya historiografi tradisional yang merekam sejarah dengan unsur mitos, legenda, dan interpretasi subjektif. Kajian filologi memungkinkan rekonstruksi dan analisis teks secara kritis untuk mengungkap bagaimana konflik sosial dan politik yang digambarkan dalam babad tersebut merefleksikan dinamika kekuasaan serta integrasi bangsa pada masa lalu. Metode filologi dalam penelitian ini meliputi inventarisasi, deskripsi, kritik teks, serta interpretasi isi teks. Kritik teks digunakan untuk memastikan validitas sumber, sementara interpretasi dilakukan untuk memahami bagaimana Babad Demak merepresentasikan ketegangan sosial-politik di era transisi dari kerajaan Hindu-Buddha ke kekuasaan Islam. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual dalam memahami peran historiografi tradisional dalam membangun narasi kebangsaan.

Studi terhadap Babad Demak melalui pendekatan filologi diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana konflik sosial-politik masa lalu dapat menjadi refleksi bagi penguatan integrasi bangsa Indonesia di masa kini. Berdasarkan uraian pendahuluan, dapat dirumuskan permasalahan yakni: (1) Apa bentuk konflik sosial dan politik transisi kebudayaan Jawa Hindu-Buddha ke Islam dalam Babad Demak?, dan (2) Bagaimana refleksi masyarakat yang berintegritas?. Melalui rumusan masalah tersebut kita dapat mengetahui: (1) Bentuk konflik sosial dan politik dalam transisi kebudayaan Jawa Hindu-Buddha ke Islam dalam Babad Demak, dan (2) Refleksi masyarakat yang berintegritas.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik. Menurut Sugiyono (2016:15) penelitian kualitatif adalah sebuah metode dalam penelitian objek alamiah yang mengutamakan makna. Ratna (2013:53) menjelaskan bahwa yang dimaksud metode deskriptif-analitik adalah sebuah metode yang dilakukan dengan cara menganalisis gambaran kenyataan, tujuan dari metode ini diharapkan mampu memperoleh hasil yang jelas dan objektif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah naskah Serat Babad Demak yang telah didigitalisasi oleh Perpustakaan Nasional serta sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, artikel, dan jurnal yang dikumpulkan dan digunakan sebagai referensi dan pendukung data yang diperoleh dari sumber primer.

Penelitian ini dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis isi dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan valid yang dapat diperiksa dan diteliti melalui konteks (Krippendorff dalam Azizah, 2017). Dalam melakukan analisis data, peneliti memilih, membandingkan, menggabung, dan memilih makna yang berbeda supaya menemukan makna yang sesuai. Peneliti melakukan pembacaan berulang pada pustaka dan memperhatikan masukan yang diberikan oleh pembimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji naskah babad Demak yang bersumber dari Perpustakaan Nasional dengan nomor panggil NB 332 berbahan kertas dan merupakan naskah karangan Harja Rumeksa yang ditulis pada tahun 1901 Babad Demak ditulis dalam bentuk pupuh-pupuh macapat yang mana merupakan format penulisan puisi Jawa yang populer digunakan untuk menuliskan sastra Jawa. Secara garis besar naskah ini menceritakan tentang asal-usul

berdirinya Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang menandai berakhirnya dominasi agama Hindu-Buddha di tanah Jawa serta transisi antara kebudayaan Jawa Kuno dengan kebudayaan Jawa pertengahan.

Situasi transisi struktural tersebut banyak menimbulkan dinamika yang terjadi, termasuk dinamika yang sifatnya degradatif terhadap kondisi sosial dan politik. Proses transisi yang berlatar belakang zaman kerajaan Majapahit melibatkan perubahan struktur dalam masyarakat dan negara. Dalam Babad Demak perubahan yang paling besar pengaruhnya terjadi adalah perubahan agama masyarakat Majapahit karena masuknya Islam di Pulau Jawa.

Penyebab Konflik Sosial dan politik dalam Babad Demak

Perubahan yang terjadi di masa akhir kerajaan Majapahit menimbulkan munculnya konflik struktural di dalam wilayah kedaulatan. Menurut Wahyudi (2021:66) konflik struktural merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketegangan antar struktur yang saling bersaing untuk mendapatkan suatu sumber daya. Persaingan antar kelompok struktur dalam masyarakat membawa kepentingan masing-masing yang mereka unggulkan di atas kelompok yang lain. Oackland (dalam Wahyudi, 2021:66) menyebutkan bahwa konflik struktural erat kaitannya dengan tindakan pengucilan sosial, perampasan, dominasi politik, ketidakadilan, penindasan dan lain-lain yang kesemuanya berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Persaingan antar kelompok dalam Babad Demak dilakukan oleh umat Hindu-Buddha (Buda) dengan umat Islam. Kerajaan Majapahit sebagai imperium Hindu terbesar di Asia Tenggara ketika itu berusaha mempertahankan dominasi politik maupun kedudukannya yang tengah terancam karena adanya agama baru yang masuk yaitu agama Islam. Sedangkan agama Islam sebagai agama dakwah yang berusaha menyebarkan Islam kepada seluruh manusia ketika itu di Jawa di bawah komando Wali Sanga yang gencar mengislamkan Pulau Jawa. Adanya dua pihak yang saling bertentangan tersebut menimbulkan munculnya konflik. Penyebab konflik serta kronologi dan dampaknya akan dipaparkan di bawah ini.

1. Konfrontasi antar Umat Beragama

Pemicu utama konflik dalam Babad Demak adalah adanya gesekan antara agama Islam yang masuk ke Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri merupakan benteng terakhir bagi kekuatan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Setelah keruntuhannya di Nusantara tidak ada kerajaan Hindu-Buddha sebesar kerajaan Majapahit dan agama Hindu

terpusat di Pulau Bali. Dalam Babad Demak kepercayaan lama milik orang Jawa yang berupa agama Hindu-Buddha disebut sebagai agama Buda. Sedangkan istilah Hindu merupakan istilah yang digunakan baru setelah zaman kolonial (Flood, 1996). Babad Demak mengisahkan bahwa semua daerah di pesisir Jawa telah terislamkan kecuali wilayah pedalaman yang masih menganut agama Hindu.

Gêtas Pandhawa gya nambut ing krami / antuk putra putri ing Sumêdhang / atug dennya ajêjodhon / dupi antara dangu / kanan kêring Dêmak nagari / wus kathah janma Islam / tan kêna ingétung / malah wong urut samodra / pasisir lor Grêsik Pathi lan Sêmawis / Kêndhal Batang Kalongan // (Dhandhanggula 24:4)

Têgal Cêrbon Pasundhan waradin / Krawang Batawi Bantên samya Islam / kang sih Buda siji roro / mèstu agami rasul / samya nêbut kalimah kalih / hailaha ilallah / anna mukkamadun / rasullolah midering rat / Tanah Jawa lan pasisir kulon ugi / akèh wong manjing Islam // (Dhandhanggula 24:5)

Terjemahan : Getas Pandhawa segera menikah / memperoleh istri putri Sumedhang / cocok berjodoh / tidak lama kemudian / kanan dan kiri negara Demak / sudah banyak orang Islam / tidak dapat dihitung / malahan berturut-turut di laut / pesisir utara Gresik Pathi dan Semarang / Kendhal Batang Pekalongan // (Dhandhanggula 24:4)

Tegal Cirebon Pasundhan merata / Karawang Betawi Banten sama-sama Islam / yang masih Buda satu dua / mengikuti agama rasul / sama-sama menyebut dua kalimat / lailaha ilallah / anna muhammadun / rasulullah mengelilingi bumi / Tanah Jawa dan pesisir utara juga / banyak orang masuk Islam // (Dhandhanggula 24:5)

Perbedaan utama yang terlihat antara agama Hindu dan Islam adalah konsep ketuhanan yang diajarkan. Agama Islam merupakan agama monoteisme murni yang hanya menyembah kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam, sedangkan agama Hindu merupakan agama yang memiliki beragam konsep ketuhanan yang secara garis besar mempercayai banyak dewa (Sunampan, 2021:117). Oleh karena itu konsep ketuhanan yang dibawakan oleh agama Islam sebagai agama yang baru masuk ke Pulau Jawa pada saat itu amar bertentangan dengan agama Hindu yang dianut raja Majapahit.

Agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin (menjadi rahmat bagi semesta alam) oleh karena itu setiap orang yang beragama agama Islam hendaknya turut mengajak orang lain untuk memeluk agama Islam sebagai jalan keselamatan dunia akhirat melalui proses berdakwah. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan “Sampaikanlah apa yang kamu terima dari padaku walaupun hanya satu ayat.” (Tasmara, 1997: 33).

Pihak yang berperan besar dalam Islamisasi Pulau Jawa adalah Wali Sanga yang terdiri dari sembilan wali. Maka dapat dikatakan bahwa motif utama Islamisasi Pulau Jawa adalah atas dasar implementasi ajaran agama Islam. Kerajaan Majapahit sebagai basis agama

Hindu merupakan tujuan utama dari para wali untuk diislamkan. Apabila kerajaan Majapahit telah tunduk atau menganut ajaran Islam maka tentunya proses Islamisasi di Pulau Jawa akan lebih mudah dilakukan. Sehingga dalam implementasi gerakan dakwah tersebut terdapat relasi antara penyebaran agama dan penghimpunan kekuatan politik. Dalam hal ini penyebaran agama Islam dan penghimpunan kekuatan politik bersifat simbiotik. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh para wali dan penghimpunan kekuatan politiknya dipusatkan kepada Raden Patah yang merupakan putera mahkota Kerajaan Majapahit.

Mung sinuwun Prabu Majapahit / Brawijaya sawadya punggawa / priyayi kang gèdhé gèdhé / dèrèng wontên mituhu / maksih kêkah agami lami / Buda srèngat Ywang Brama / nêmbah Sang Ywang Guru / Krêsna Wisnu èsthining tyas / para déwa déwa kang dèn widi widi / yèka agama Buda // (Dhandhanggula 24:6)

Terjemahan :

Hanya raja Majapahit / Brawijaya beserta punggawanya / serta pejabat besar / belum ada yang mengimani / masih memeluk agama lama / Buda ajaran Hyang Brama / menyembah Sang Hyang Guru / Kresna Wisnu dipegang dalam hati / para dewa yang dipertuhankan / itulah agama Buda // (Dhandhanggula 24:6)

Ketidaksamaan arah antara pusat Kerajaan Majapahit dengan wilayah-wilayah pesisir seperti yang disebutkan dalam Babad Demak yaitu Gresik, Pati, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Cirebon, Pasundan, dan Betawi yang telah menganut Islam menjadikan Kerajaan Majapahit tersudut. Hal ini dikarenakan daerah-daerah yang telah menganut Islam menjadi enggan menginduk ke negara pusat yang masih ‘kafir’. Kondisi yang demikian tentunya amat merugikan bagi Kerajaan Majapahit karena daerah pesisir merupakan pusat perdagangan dan jalur pelayaran yang memiliki sumbangsih besar terhadap perekonomian dan mendatangkan keuntungan bagi negara. Dari wilayah-wilayah pesisir ini kemudian akan lahir kesultanan-kesultanan Islam yang diawali oleh Kesultanan Demak yang nantinya akan menjadikan berkurangnya pemeluk agama Hindu-Buddha secara drastis di Pulau Jawa (Subagya, 1981: 17).

Berdasarkan perbedaan yang ada dalam pandangan keagamaan antara Kerajaan Majapahit dan agama Islam yang diwakili oleh para Wali, hubungan yang terjadi berlangsung secara kompetitif tanpa adanya dialog yang sehat antara Prabu Brawijaya V dengan para Wali sebagai penyebar agama Islam. Kerajaan Majapahit bersaing dengan para Wali dalam mendukung eksistensi ajaran agamanya masing-masing. Namun mengingat ketika itu Kerajaan Majapahit sedang dalam masa kebobrokkannya, para Wali datang sebagai penolong rakyat yang kemudian berangsur-angsur berpindah keyakinan menjadi Islam.

Kerajaan Majapahit dengan wilayah yang luas tidak mampu merangkul wilayahnya

sendiri sehingga banyak kerajaan di pesisir yang membelot kepada Kerajaan Majapahit dan mendukung pendirian Kesultanan Demak. Relasi antara agama dan politik juga menjadi kunci kesuksesan para Wali dalam menyebarkan pengaruh Islam di tanah Jawa. Apalagi dengan adanya Raden Patah sebagai keturunan raja Majapahit yang telah menganut Islam. Bisa dibilang dalam hal darah dan keturunan Kesultanan Demak masih satu darah dengan Kerajaan Majapahit sehingga akan melegitimasi rakyat untuk mendukung berdirinya Kesultanan Demak sebagai pembaharu tatanan sosial di Pulau Jawa.

Agama dalam masa akhir Kerajaan Majapahit menjadi suatu faktor yang bersifat disintegratif disebabkan bukan karena ajaran agama, melainkan sifat dari manusia itu sendiri yang tidak dapat menjalankan perintah agama dengan baik. Perbedaan pandangan antar agama sebenarnya merupakan hal yang mutlak karena pada dasarnya tiap agama memiliki bentuk keyakinan dan ibadah yang berbeda-beda, namun sikap mental yang dimiliki oleh manusia itu sendiri menjadikan dirinya tidak mampu menerima perbedaan yang ada, sebagaimana yang dilakukan oleh Prabu Brawijaya V yang memperolok cara beribadah umat Islam.

Alahmu nora nèng jisim / nora dumunung nèng jaba / jroning bumi langit kothong / tansah kok pupuji asma / dadya mangran swara / kumandhang kang tanpa wujud / sira puji bëndina // (Asmaradana 25:25)

Terjemahan : Allahmu tidak berada dalam tubuh / tidak berada di luar / dalam bumi maupun langit kosong / senantiasa namanya kamu puji / jadilah kamu bertuhan dengan suara / berkumandang tanpa wujud / yang kamu puji tiap hari // (Asmaradana 25:25)

Momen ramainya masyarakat masuk Islam serta putera mahkota yang telah memeluk agama Islam oleh Brawijaya V tidak dimanfaatkan dengan baik, malahan beliau membuat jarak dengan pengikut Islam menjadi semakin renggang. Pada akhirnya jarak yang tercipta ini membuat motivasi umat Islam untuk membentuk pemerintahan yang Islami semakin meningkat. Ditandai dengan perjuangan Raden Patah yang didukung para wali serta daerah bawahan yang telah mengenal Islam untuk bersatu padu membentuk Kesultanan Demak dan meruntuhkan Kerajaan Majapahit yang selama sekian ratus tahun menjadi benteng bagi pelestarian agama Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Relasi antara agama dan politik oleh Raden Patah dikombinasikan dalam pendirian Kesultanan Demak dalam bentuk legitimasi secara tradisional (berdasarkan hubungan darah) serta legitimasi kharismatik (melalui para Wali Sanga).

2. Pemimpin Lebih Mengutamakan Kepentingan Pribadi

Raja Brawijaya V merupakan raja Majapahit terakhir yang dikisahkan dalam Babad

Demak. Raja Brawijaya V pula yang menyaksikan perubahan yang terjadi pada negerinya diawali dengan masuknya orang-orang dari luar yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Sebagai seorang raja tentunya beliau memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Apalagi dalam sistem kerajaan Majapahit terdapat konsep dewaraja yaitu anggapan bahwa raja merupakan reinkarnasi dari dewa yang memiliki kekuasaan sebagai wujud mikrokosmos bersanding dengan kekuasaan para dewa yang memiliki kekuasaan makrokosmos (Geldern, 1982). Adanya kekuasaan serta pandangan yang sedemikian besar terhadap raja menimbulkan pemanfaatan kekuasaan berdasarkan kepentingan pribadi raja tersebut. Apalagi ketika itu Majapahit menerapkan monarki absolut yang mana menurut Kansil (2018:17) monarki absolut membuat kekuasaan raja tidak dibatasi oleh undang-undang sehingga sifatnya tidak terbatas dan dapat melakukan apapun sesuka hatinya.

Parab Bratanjung Majapahit / sigra putranira Brawijaya / kaping gangsal pungkasané / karaton Majalêngka / sirna ngalih Dêmak Nagari / astha narpa ténaya / nanging kang sinawung/ ing dalêm sarat punika / Brawijaya pamêkas putrané rèki / wasta Bondhan Kêjawan // (Dhandhanggula 1:11)

Terjemahan :

Bernama Bratanjung Majapahit / segera puteranya Brawijaya / kelima yang terakhir / (raja) kerajaan Majapahit / hancur berganti negara Demak / raja memiliki anak delapan / namun yang diceritakan / dalam serat ini / anak Brawijaya terakhir / bernama Bondhan Kejawan // (Dhandhanggula 1:11)

Raja Brawijaya V memiliki sikap yang mudah tergoda oleh wanita. Hal ini menyebabkan beliau banyak memiliki istri dan selir sehingga lupa akan pemerintahannya. Hal ini memiliki korelasi dengan konsep dewa raja dimana dewa memiliki pasangan-pasangan (*shakti*-nya) yang apabila menyatu akan memunculkan kekuatan besar yang membawa pada kemakmuran (Geldern, 1982).

Adanya keturunan yang banyak dalam sistem monarki memungkinkan agar garis keturunan tetap satu jalur antar generasi dalam satu dinasti. Apalagi pada zaman dahulu teknologi kesehatan tidak sebagus dan secanggih sekarang, sehingga guna mempersiapkan penerusnya raja akan memiliki banyak keturunan. Akan tetapi banyaknya keturunan juga akan memicu persaingan di antara anak-anak sang raja demi berebut kekuasaan. Anak raja Brawijaya V yang diceritakan dalam Babad Demak hanya dua orang yaitu Raden Patah dan Bondhan Kejawan. Raden Patah sendiri kemudian dibesarkan oleh Arya Damar setelah ibunya diceraikan oleh Brawijaya V. Raden Patah menjadi tokoh sentral dalam kehancuran Kerajaan Majapahit, sedangkan Bondhan Kejawan merupakan tokoh pendukung yang kelak keturunannya akan menguasai Kerajaan Pajang sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak.

Rehning kapambeng garbini / tetela turas narendra / karsaning nata samangka / putra Cina ingkang wadhat / yun pinaring ken mari / arya damar plembang sampun / lepas kirdhaning sulaksuma // (Asmaradana 11:37)

Terjemahan :

Karena sedang hamil / jelas keturunan raja / ketika itu raja berkehendak / putra Cina yang bersumpah wadat / diberikan istrinya / arya damar dari Palembang / berjodoh // (Asmaradana 11:37)

Sikap Brawijaya V yang main wanita ini menjadikan beliau tidak memperhatikan kondisi kerajaannya sendiri. Hal ini merupakan rentetan peristiwa yang terjadi setelah banyaknya konflik dalam tubuh kerajaan Majapahit itu sendiri, seperti perang paregreg yang menjadikan kerajaan menjadi tidak stabil. Rakyat banyak yang menderita sehingga berpindah haluan kepada para penyebar agama Islam yang datang membawa pemikiran dan teknologi baru yang menyejahterakan rakyat. Relasi antara penguasa dengan rakyat yang tidak sehat inilah yang membuat melemahnya eksistensi Kerajaan Majapahit di mata rakyat.

3. Kurangnya Kontrol terhadap Pejabat dan Wilayah Kedaulatan

Raden Patah sebagai anak yang merasa telah memperoleh jalan yang benar melalui agama Islam dan bimbingan para Wali memiliki keinginan untuk mengajak ayah biologisnya memeluk agama Islam. Tindakan ini juga memiliki nilai politis guna mengamankan kedudukan masyarakat Jawa yang telah menganut agama Islam agar tetap selamat dalam naungan raja yang juga beragama Islam. Namun karena Brawijaya V sebagai seorang raja sekaligus orang yang berpengaruh secara spiritual enggan menerima agama Islam yang beliau anggap sebagai ajaran yang dibuat-buat serta masih kokoh dalam mengimani ajaran Hindu, maka Brawijaya V menolak mentah-mentah ajakan putranya dengan perkataan yang tegas dan menghardik agama Islam.

Mangka tamané wong kang cêgah juti / pra durta pantês antuk pidana / rèh malaning akèh / dé manêmbah Yang Agung / nora kêna kaki pinardi / iku Agama Buda / séjé lan gamamu / bujuk bujuk ngérang ngérang / ngiming ngiming maméngin marang wong pingging / métu wuduk rasulan // (Dhandhanggula 24:33)

Ngaku-aku agama sinêlir / ngunggulakên utusaning Allah / kowé tan wêruh jèrèngé / mujijat sulap palsu / suprandéné sira tan uning / èndi ana wong bisa / mabur tanpa wulu / ngaku mring Mèkah sadhéla / sajatiné wong bodho angathik athik / samana sang dipatya // (Dhandhanggula 24:34)

Terjemahan :

Maka keutamaan orang yang mencegah perbuatan buruk / para penjahat pantas memperoleh hukuman / karena menimbulkan kerugian / sedangkan menyembah Tuhan Yang Agung / tidak dapat kamu ikuti / agama Buda itu / berbeda dengan agamamu / membujuk dan mengarang / mengiming-iming orang yang bodoh / mengeluarkan wuduk rasulan // (Dhandhanggula 24:33)

Mengaku agama yang unggul / mengunggulkan utusan Allah / kamu tidak tahu sebenarnya / mukjizat sulap yang palsu / sedangkan kamu tidak tahu / mana ada orang

bisa / terbang tanpa bulu / mengaku di Mekah sebentar / sesungguhnya orang bodoh yang membual / ketika itu sang adipati // (Dhandhanggula 24:34)

Penolakan Brawijaya V terhadap Islam dilakukan secara frontal yang mengakibatkan para Wali dan Raden Patah yang sebelumnya masih menggunakan cara-cara halus dan penghormatan berubah haluan agar menggunakan cara yang lebih keras dan melibatkan penggalangan kekuatan militer. Raja Brawijaya di sini dapat dikatakan kurang bijaksana dalam melakukan usaha diplomatis terhadap pemeluk agama Islam yang diwakili oleh anaknya sendiri yaitu Raden Patah sehingga menimbulkan chaos dan hubungan yang lebih buruk dengan para Wali sebagai sosok-sosok yang berpengaruh di Tanah Jawa.

Dewan wali sanga yang sebelumnya masih menghormati Brawijaya V sebagai penguasa Mjapahit sekaligus ayah biologis Raden Patah, karena atas dasar pertimbangan bahwa Brawijaya V tidak akan berubah masuk Islam dan menolak agama Islam dengan keras maka pada akhirnya menggunakan siasat lain untuk menaklukkan kerajaan Majapahit. Dewan wali sanga sebagai kekuatan kharismatik agama Islam tentu mudah saja menghimpun kekuatan dari wilayah-wilayah yang memiliki pesantren khususnya di wilayah pesisir Jawa.

Hèh ta jèbèng nata praja / puluh puluh wus pasthi karsèng Widi / ramanta ingkang sinuhun / tan arsa manjing Islam / mung kinarya pépèka jatiné mingkuh / maksih kèkah gama Buda / kang harda manêmbah budi // (Pangkur 28:1)

Terjemahan:

Wahai anakku adipati / bagaimanapun sudah menjadi kehendak Tuhan / ayahmu sang raja / tidak ingin masuk Islam / hanya ceroboh sesungguhnya menolak / masih kokoh beragama Buda / yang sangat mengutamakan budi // (Pangkur 28:1)

Raden Patah dalam hal ini dapat dikatakan melakukan aksi revolusi. Menurut KBBI revolusi adalah perubahan ketatanegaraan melalui upaya kekerasan. Aksi revolusi yang dilakukan oleh Raden Patah dapat dikatakan merupakan perang saudara karena terjadi antara ayah dan anak yang memiliki pertalian darah. Pada akhirnya perlawanan yang dilakukan oleh Raden Patah terus berulang terjadi dalam sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan dan kebudayaan Jawa masa Islam.

Nêngna ingkang winurcita / kadya sarèng gancaré Majapahit / sêmana ingkang sinuhun / tampi sasmitaning Yang / ana swara ing dirgantara manguwuh / hèh ta Prabu Brawijaya / yèn sira arsa basuki // (Pangkur 28:2)

sagung trah garwatmanira / ngupayaa sarat sranané bécik / kêris siji dhapur sèwu / tamtu trahira bénjing / nora pègat manêkêm tanah Jawa gung / sangka katga dhapur sasra / dadya pusakèng narpati // (Pangkur 28:3)

Terjemahan :

Yang dikisahkan berhenti / bersamaan dengan kisah Majapahit / waktu itu raja / menerima pertanda Tuhan / ada suara dari langit berteriak / wahai Prabu Brawijaya /

jika kamu ingin selamat // (Pangkur 28:2)

Semua keturunan dan istrimu / upayakanlah syarat yang bagus / keris satu berdhapur sewu / tentu anak cucumu nanti / tidak akan berhenti berkuasa di Tanah Jawa / keris berdhapur seribu / jadikanlah pusaka raja // (Pangkur 28:3)

Pada akhir perdebatan antara Raden Patah dengan Raja Brawijaya, setelah Raja Brawijaya tetap kokoh memeluk Hindu, beliau menerima wangsit agar membuat keris sebagai sarana keselamatan. Hal ini merupakan bentuk legitimasi untuk pemertahanan kekuasaan raja. Namun yang perlu diingat suara tersebut menyatakan bahwa manfaat keris tersebut akan menjadikan keturunan Raja Brawijaya tetap berkuasa di Tanah Jawa, sedangkan Raden Patah sendiri juga termasuk keturunan Raja Brawijaya. Kondisi yang sebenarnya menguntungkan malah berbalik arah untuk memperkuat kedudukan Raden Patah lebih unggul daripada ayahnya sendiri.

Angling sang wali pamungkas / kulup supa ing sun sung wrin sirèki / sutanta Ki Nom kumênthus / saguh mring Brawijaya / karya kêris siji ing kang dhapur sèwu / kinarya srana prajarja / ing wasana tanpa dadi // (Pangkur 28:38)

Terjemahan :

Berkatalah sang wali terakhir / nak Supa aku beri tahu kamu / anakmu Ki Nom membual / menyanggupi Brawijaya / membuat keris satu berdhapur sewu / dijadikan sarana kemakmuran negara / pada akhirnya gagal // (Pangkur 28:38)

Babad Demak sebagai naskah historiografi tradisional tentunya memiliki hal-hal yang tidak ilmiah sebagaimana dalam kisah gagalnya Brawijaya V dalam menciptakan keris untuk mengembalikan kemakmuran negerinya, namun hal yang kita tangkap dari kisah ini adalah Prabu Brawijaya V merupakan pemimpin yang kurang cakap dikarenakan tidak mampu mempertahankan kekuasaannya di Kerajaan Majapahit, bisa jadi terdapat hal simbolik yang disimbolkan sebagai keris dalam bagian kisah ini. Namun inti dari kisah tersebut adalah kegagalan upaya Raja Brawijaya V.

Kerajaan Majapahit di masa akhir kejayaannya ini dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi perang saudara yang dilakukan oleh Raden Patah. Sebelumnya dalam perang Paregreg yang juga merupakan perang saudara, kerajaan Majapahit masih dapat bertahan karena perang utamanya lebih fokus terjadi dalam lingkup internal antara Kerajaan Majapahit timur dan Majapahit barat yang sama-sama beragama Hindu. Namun dalam perang saudara melawan Raden Patah serta para Wali, kerajaan Majapahit harus menghadapi satu bentuk perlawanan baru yang didasari oleh perbedaan agama. Dalam pandangan pihak Raden Patah tentunya perang yang dilakukan ini merupakan perang suci guna melepaskan diri dari kekuasaan raja lalim yang belum menganut Islam. Oleh karena

itu penghimpunan politik yang dilakukan oleh para wali juga berasal dari kalangan agamawan melalui pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan bercorak Islam yang ketika pada masa Majapahit akhir lembaga ini banyak tumbuh di wilayah-wilayah pesisir Pulau Jawa.

Ana jangka wirayat kagaib / para rêsi dwija kang bijaksa / kraton Majapahit têmebé / gêmpur déning sirèku / kang ngrabasèng pura pra santri / éra éru puyêngan / salin gama Rasul / nanging Budané tan ilang / malah kisruh rusuh tataning agami / paduming sukma purba // (Dhandhanggula 24:37)

Terjemahan :

Ada ramalan ghaib / dari para resi serta guru yang bijaksana / istana Majapahit kelak / akan kamu hancurkan / yang merusak kota para santri / banyak yang bingung / berganti agama Islam / tetapi Budanya tidak hilang / malah kisruh dan berantakan tata agama / petunjuk Yang Maha Awal // (Dhandhanggula 24:37)

Masyarakat Jawa setelah mengenal Islam dalam Babad Demak ini dapat diketahui dalam dunia keilmuan telah terdiktomi menjadi kaum santri yang terdiri dari para siswa serta ulama yang mempelajari agama Islam di pondok pesantren, kaum ini merupakan didikan para Wali sanga yang menyebarkan agama Islam melalui jalur pendidikan juga. Raden Patah merupakan pihak yang dekat dengan kaum santri. Sedangkan dalam kerohanian Hindu, kaum inteleknya berasal dari para brahmana dan resi yang berasal dari mandala-mandala di seluruh kerajaan sebagai tempat menuntut ilmu. Raja Brawijaya V merupakan pihak yang dekat dengan golongan ini.

Kondisi banyaknya kaum santri menjadi keuntungan bagi Raden Patah untuk menghimpun kekuatan sehingga kekuatan Raden Patah kebanyakan berasal dari kaum santri. Sedangkan Brawijaya V dengan memiliki pendukung yang stagnan. Malahan banyak mandala yang telah diislamkan dan berubah menjadi pesantren, sehingga kekuatan politis Raja Brawijaya V berkurang drastis.

Refleksi terhadap Penguatan Integrasi Bangsa Indonesia

Berdasarkan uraian kondisi sosial dan politik yang terjadi pada masa akhir Kerajaan Majapahit dalam pemerintahan Prabu Brawijaya V menurut Babad Demak dapat diketahui adanya persoalan yang mendasari keruntuhan Kerajaan Majapahit yaitu: (1) Konfrontasi antar umat beragama, (2) Pemimpin lebih mengutamakan kepentingan pribadi, (3) Kurangnya kontrol terhadap pejabat dan wilayah kedaulatan.

Dapat dikatakan bahwa pada masa akhir kerajaan Majapahit terjadi disintegrasi bangsa ke arah perpecahan. Berdasarkan hal-hal tersebut bisa dirumuskan kondisi ideal

integrasi bangsa yang merupakan kebalikan dari kondisi pemimpin serta kondisi sosial-politik pada masa akhir Kerajaan Majapahit dalam Babad Demak.

1. Perlu Adanya Dialog yang Sehat antar Umat Beragama

Agama merupakan satu hal yang dijadikan hal penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan agama merupakan penjembutan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan setelah mati dalam hal spiritual. Manusia pada umumnya tidak ingin berhenti menikmati kebahagiaan hanya di dunia, melainkan juga menginginkan kebahagiaan setelah mati. Oleh karena itu agama hadir membawa petunjuk-petunjuk dari Tuhan guna memberi jalan bagi manusia agar dapat memperoleh kehidupan yang membahagiakan setelah mati dengan cara melaksanakan aturan-aturan agama. Agama di dunia ini bermacam-macam sehingga individu yang memeluk suatu agama akan memperoleh identitas terpisah dari individu lain yang memeluk agama lain. Dari sinilah muncul pengkotak-kotakan manusia berdasarkan agamanya.

Agama selain bersifat spiritual juga memiliki sifat fisik dalam kehidupan bermasyarakat. Nottingham (2002:26) menjelaskan bahwa fungsi agama dalam masyarakat adalah sebagai: (1) Fungsi edukatif, agama memberikan pengajaran bagi umat manusia untuk melakukan tatacara tertentu, (2) Fungsi penyelamat, agama merupakan sarana bagi manusia untuk bahagia di dunia dan di akhirat, (3) Fungsi pendamaian, melalui agama manusia dapat merasakan kedamaian jiwa yang membawa dirinya untuk dapat hidup dengan mutu yang baik, (4) fungsi sosial kontrol, agama mengajarkan adanya perintah dan larangan yang menjadikan perilaku manusia terbatas dan terarah ke hal-hal yang baik agar tidak melakukan tindakan buruk yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, (5) Fungsi pemupuk solidaritas, agama akan membentuk identitas bagi seorang individu, kesamaan identitas antar pemeluk agama akan menjadikan individu-individu tersebut membentuk sebuah kelompok, (6) Fungsi transformatif, agama merupakan sarana bagi manusia untuk berubah menjadi lebih baik lagi.

Agama merupakan penjaga moralitas dan norma yang mengikat dan mengajak manusia untuk berbuat baik sehingga tatanan sosial masyarakat dapat terjaga dan meningkatkan mutu hidup. Namun tidak seperti hukum-hukum lain yang sifatnya material dan hanya berlaku di dunia, hukum agama menjadi suatu hal yang terkadang amat dijunjung tinggi di atas segalanya karena merupakan hukum yang bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dalam hal ini agama memiliki kelebihan karena manusia akan lebih menaatinya karena manusia yang beriman tidak akan berani melakukan pelanggaran

terhadap perintah tuhan karena takut akan balasan yang diberukan Tuhan baik di dunia maupun kelak pada kehidupan setelah kematian.

Kegentingan terjadi ketika identitas keagamaan yang tertanam kuat dalam jiwa masyarakat terjadi di tempat yang majemuk. Umumnya solidaritas yang terjadi di antara umat beragama adalah dalam golongan mereka sendiri, sehingga pada golongan lain tidak terdapat ikatan yang menyatukan perbedaan agama. Apalagi dengan kuatnya identitas keagamaan yang membuat adanya jarak di antara pemeluk agama yang memiliki keyakinan berbeda-beda. Untuk itu sebagai penjemabatan antar agama diperlukan dialog antar agama. Menurut Mukti Ali dalam Halim (2015:38) dialog antar agama adalah upaya mempertemukan orang-orang dari kelompok agama atau ideologi yang berbeda untuk meraih pengertian bersama tentang berbagai isu tertentu dan memutuskan setuju atau tidak setuju dalam bentuk sikap yang saling mengapresiasi dan kerjasama.

Adapun bentuk-bentuk dialog antar agama adalah: (1) Diskusi teologis yang digunakan untuk saling menjelaskan ajaran agama atau keyakinan yang dianut oleh masing-masing pihak, (2) Dialog untuk doa bersama digunakan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing namun dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk perdamaian dunia maupun bentuk rasa empati terhadap suatu peristiwa tertentu, (3) Dialog kerjasama digunakan untuk meringankan beban orang lain dan diri sendiri tanpa memandang orang lain apa agamanya serta siapa dia, dan (4) Dialog antar monastik digunakan untuk bertukar pengalaman maupun cerita terhadap orang yang menjadi panutan dalam agama masing-masing sebagai cara meluruskan prasangka buruk, pandangan salah dan kecurigaan antar umat beragama dengan cara tinggal di salah satu tempat praktik keagamaan pada waktu tertentu yang telah ditentukan.

Melalui pengenalan-pengenalan tersebut nantinya akan diharapkan timbul suatu keakraban yang pada akhirnya dapat menciptakan solidaritas antar umat beragama. Solidaritas di sini merupakan elemen yang penting bagi terciptanya masyarakat yang berintegrasi. Sehingga solidaritas tidak hanya tercipta dalam lingkup umat yang satu agama saja, melainkan solidaritas itu tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang memiliki berbagai agama. Dialog antar agama seperti ini khususnya sangat bermanfaat dilakukan dalam masyarakat majemuk yang multikultural.

2. Pemimpin Harus Mengutamakan Kepentingan Negara di Atas Kepentingan Pribadi

Menurut Kouzes (2004:17) pemimpin merupakan seorang pionir sebagai orang yang

menuntun dan mengarahkan hal yang dipimpinnya. Pemimpin yang mempunyai visi yang jelas dapat menjadi penuntun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin. Pemimpin harus dapat membedakan antara hal yang sifatnya demi khalayak umum dengan hal yang sifatnya personal. Sehingga dalam kepemimpinan yang ideal harus terdapat pemisahan antara kepentingan pribadi yang sifatnya personal dengan kepentingan negara yang sifatnya kemaslahatan bersama. Pemimpin sebagai sosok yang telah diamanahi oleh rakyat untuk memimpin jalannya negara telah mengembani kekuasaan. Weber (dalam Budiardjo, 2008) menjelaskan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemampuan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun atas dasar kemampuan ini.

Berbekal kekuasaan serta legitimasi yang diperoleh dari rakyat, hendaknya pemimpin menggunakan kekuasaannya tersebut guna menciptakan kebaikan bagi rakyatnya. Hal pokok yang dapat dilakukan sebagai cara membatasi kepentingan pribadi dengan kepentingan negara adalah adanya sebuah konstitusi yang mengikat dan membatasi. Konstitusi merupakan suatu hal yang membentuk atau menyatakan eksistensi suatu negara melalui bentuk tertulis dan tidak tertulis dalam menyelenggarakan pemerintahan (Lubis, 2008:37). Konstitusi dapat memperjelas sekat-sekat tugas dan kewajiban antar lembaga dan elemen dalam pemerintahan. Menurut Asshiddiqie (2006:149) konstitusi memiliki tujuan (1) menegakkan keadilan, (2) memberikan kepastian, (3) menjamin kedamaian. Konstitusi dalam suatu negara diwujudkan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan yang mengikat seluruh warga negara termasuk golongan pejabat sebagai pelaksana kekuasaan. Dalam negara yang menganut trias politika kekuasaan menyusun konstitusi dimiliki oleh lembaga legislatif. Di antara kesemua hal itu moral dan etika para pejabat menjadi hal yang amat penting guna mampu mengemban amanah dan jabatannya secara baik. Kesadaran menjadi kunci agar seorang pejabat negara paham betul bagaimana ia harus bertindak.

3. Kontrol Penuh terhadap Seluruh Pejabat dan Wilayah Kedaulatan

Kedudukan penguasa dan kekuasaan erat dengan wilayah kedaulatan. Menurut Soehino (2002:7-8) unsur berdirinya suatu negara terdiri atas rakyat, pemerintahan yang berdaulat, wilayah, serta pengakuan dari negara lain. Relasi antara keempat aspek tersebut membentuk sebuah tatanan negara yang ideal. Apabila ada di antara salah satu saja aspek tersebut tidak ada ataupun kurang maka sebuah negara tidak dapat dikatakan sebagai negara. Pentingnya wilayah dalam komponen negara adalah sebagai tempat negara itu berdiri. Wilayah dalam suatu negara memang bermacam-macam ditinjau dari segi topografi, sosial,

maupun budaya yang ada pada wilayah tersebut.

Wilayah merupakan permukaan bumi yang memiliki kesamaan berdasarkan unsur-unsur tertentu. Oleh karenanya wilayah dapat bermacam-macam pembagiannya, semisal: (1) Berdasarkan administrasi wilayah dapat dibedakan menjadi desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi,. (2) Berdasarkan geografis wilayah dapat dibedakan menjadi lembah, daratan, pegunungan, dan lain-lain, dan (3) Berdasarkan asosiasi areal wilayah dapat dibedakan menjadi wilayah formal dan wilayah fungsional. Sebagai pihak yang berdaulat, pemimpin dan negara harus mampu mengayomi seluruh wilayahnya meskipun kondisi antar wilayah itu sendiri berbeda-beda dan tidak semuanya menguntungkan.

Pemimpin sebagai pengawas dan pengendali wilayah tentunya tidak akan melakukan tugasnya sendirian, melainkan dibantu oleh pejabat-pejabat di bawahnya. Secara vertikal kekuasaan ini dimulai dari urutan kabupaten/kota, provinsi, hingga di pusat. Jadi, Pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari provinsi maupun kota. Pemerintah pusat berperan sebagai pengendali pemerintahan-pemerintahan yang ada di bawahnya. Namun permasalahan yang muncul di Indonesia selama ini adalah fokus pembangunan yang hanya dilakukan di pusat-pusat daerah, sedangkan untuk wilayah terluar maupun pedalaman tidak terjamah pembangunan.

Terdapat berbagai model pembagian kekuasaan yang terdapat di dunia semisal sentralisasi (kekuasaan terpusat), desentralisasi (kekuasaan terbagi-bagi), maupun otonomi (pemberian kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri). Kebijakan-kebijakan yang dipilih oleh pemerintah dalam rangka melakukan pembagian kekuasaan terlaksana berdasarkan situasi dan kondisi daerah yang ada dalam kedaulatannya. Di Indonesia sendiri kebijakan yang diterapkan adalah desentralisasi dan otonomi daerah kepada daerah-daerah khusus.

Pembagian kekuasaan baik secara vertikal dan horizontal tidak akan berarti tanpa adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat walaupun kekuasaanya sudah terbagi tetap harus mengawasi kinerja pemerintah daerah, pun begitu pemerintah daerah harus tetap berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah yang telah diberi anggaran dana harus mampu mengefektifkan dana tersebut guna kemajuan daerah. Sehingga poin penting dalam penciptaan perhatian terhadap seluruh wilayah kedaulatan adalah adanya sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah guna memajukan dan memakmurkan negara secara bersama-sama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Babad Demak merupakan sebuah naskah Jawa klasik yang disimpan di perpustakaan nasional dengan nomor panggil NB 332 berbahan kertas dan merupakan naskah karangan Harja Rumeksa yang ditulis pada tahun 1901. Naskah ini ditulis dalam bentuk metrum macapat sebagaimana bentuk penulisan populer di era Jawa klasik. Naskah ini berisikan latar belakang berdirinya Kesultanan Demak yang menandai berakhirnya dominasi Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar yang membentengi agama Hindu dan Buddha. Dalam situasi yang demikian rakyat Jawa mengalami transisi menuju era baru yang akan memperkaya sejarah dan budaya Jawa. Situasi ini berakibat pula terhadap munculnya konflik sosial dan politik di kalangan rakyat Jawa sehingga berdasarkan konflik sosial dan politik yang terjadi pada masa itu dapat diambil beberapa refleksi berdasarkan isi Babad Demak guna menciptakan masyarakat yang berintegritas pada masa kini yaitu: (1) Adanya dialog yang sehat antar umat beragama sebagai sarana saling mengenal dan menumbuhkan rasa saling menghormati, (2) Pemimpin harus menjunjung kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dengan taat terhadap hukum negara, dan (3) Kontrol penuh terhadap seluruh wilayah kedaulatan. Di masa modern ketiga hal ini tentu lebih dapat diwadahi dalam berbagai media, di sinilah peran pemegang kekuasaan harus mampu memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi demi kebaikan bangsa dan negara.

Pemimpin harus mampu mengontrol segala celah bagi timbulnya perpecahan atau paham tertentu yang disintegratif, hal ini harus diimbangi dengan aspek moralitas pribadi para pemegang kekuasaan yang taat terhadap hukum negara, jangan sampai nantinya karena pertimbangan menutup segala celah disintegrasi malah membuat para pemimpin menjadi otoriter atau bahkan diktator.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2025). *Revolusi. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. <https://kbbi.web.id/revolusi>
- Baried, S. B., Soeratno, S. C., Sawoe, Sutrisno, S., & Syakir, M. (1985). *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Flood, G. (1996). *An Introduction to Hinduism*. Cambridge University Press.
- Halim, A. (2015). Pluralisme dan Dialog Antar Agama. *TAJDID*, 14(1), 35-60.
<https://www.tajdid.uinjambi.ac.id/index.php/tajdid/article/download/21/27>
- Heine-Geldern, R. (1982). *Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Jakarta: Rajawali.
- Kansil, C.S.T. (1989), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kouzes, J. & Posner. (2004). *The Leadership Challenge*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Krippendoff, Klaus. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Citra
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
- Niaga Rajawali Press.
- Nottingham, E. K. (2002). *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ratna, N. K. (2013). *Teori, Metode dan Teknk Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reuters. (2025, Februari 20). Students lead 'Dark Indonesia' protests against budget cuts. Reuters. Diakses dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/students-lead-dark-indonesia-protests-against-budget-cuts-2025-02-20/>
- Saifuddin, A. F. (1986). *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagya, R. (1981). *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sunampan Putra, I. W. (2021). Kajian teologi Hindu dalam teks Siwa Tattwa. *Jurnal Vidya Darsan*, 2(1), 114-126.
<https://jurnal.stahnpukuturan.ac.id/index.php/darsan/article/view/597/490>
- Soehino, S. H. (2002). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Tasmara, T. (1987). *Komunikasi Dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahyudi. (2021). *Teori konflik dan penerapannya pada ilmu-ilmu sosial*. Malang: UMM Press.